

Volume 3, Nomor 1, Juni 2015

ISSN : 2088-6179

# PROSIDING

## Seminar Nasional

Malang, 6 Juni 2015

### Peningkatan Kapasitas Peneliti dalam Memasuki Fase Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)



Universitas Kanjuruhan Malang  
The Multiculture University

# **PENYUNTING PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENELITIAN 2015**

Pelindung:  
Dr. Pieter Sahertian, M.Si

Penanggungjawab:  
Dr. Sudi Dul Aji, M.Si

Ketua:  
Drs. Sudiyono, M.Pd

Wakil Ketua:  
Drs. Choirul Huda, M.Si

Sekretaris:  
Umi Tursini, M.Pd.,Ph.D

Reviewer:  
Prof. Dr. Soedjijono, M.Pd (UNIKAMA)  
Dr. Hj. Suciati, M.Hum (UNIKAMA)  
Dra. Rahaju, M.Pd (UNIKAMA)  
Dr. Wartono, M.Pd (UM)  
Dr. Mujiono, M.Pd (UNIKAMA)  
Dr. KRT. H. Sujito, M.Pd (UNS)  
Wiji Setyaningsih, S.Kom.,M.Kom (UNIKAMA)  
Andi Nu Graha, SE.,M.Si (UNIKAMA)  
R. Anastasia Endang Susilawati, S.Pd., SE., M.SA (UNIKAMA)  
Henny Loendro, S.Pt.,MP (UNIKAMA)  
Sulthon M, M.Hum (UNIKAMA)

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENELITIAN 2015**  
**TEMA “*SEMINAR NASIONAL PENINGKATAN KAPASITAS PENELITI DALAM*  
*MEMASUKI FASE MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)*”**  
**Penyelenggara LPPM Universitas Kanjuruhan Malang**

<b>An Analysis Of Semantic On Advertisment .....</b>	<b>389 – 395</b>
Sujito, Nanang Wahyudi	

## **PENELITIAN BIDANG HUKUM**

	<b>Hal</b>
<b>Kajian Yuridis Sosilogis Dampak Perceraian Perkawinan Bagi Perempuan (Studi Kasus Dikota Malang) .....</b>	<b>396 – 402</b>
Suciati, Purwito Adi, Abdul Halim	
<b>Aspek Hukum Penanaman Modal Terhadap Kontrak Alih Teknologi Sebagai Upaya Pengembangan Industri .....</b>	<b>403 - 408</b>
Galuh Kartiko	
<b>Penerapan Hukum Dalam Putusan Hakim Pengadilan Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progesif .....</b>	<b>409 – 414</b>
Sulthon Miladiyanto	
<b>Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial Lembaga Keuangan Syariah Melalui Konsep Wakaf Produktif .....</b>	<b>415 – 421</b>
Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan, Azizah	
<b>Implikasi Undang-Undang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik) Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce Dalam Hal Jual Beli/Belanja Online .....</b>	<b>422 – 430</b>
Miya Savitri, Joice Soraya	

## **PENELITIAN BIDANG PETERNAKAN**

	<b>Hal</b>
<b>Subtitusi Konsentrat Dengan Kulit Ari Kedelai Dan Gamblong Terfermentasi <i>Rhizopus Sp</i> Terhadap Konsumsi Pakan, Pertambahan Bobot Badan Dan Konversi Pakan Pada Sapi Potong .....</b>	<b>431 – 434</b>
Dimas Pratidina Puriastuti Hadiani, Dyah Lestari	
<b>Pengaruh Penggunaan Ekstrak Kunyit Dan Jahe Sebagai Aditif Pakan Terhadap Konsumsi Pakan, Pertambahan Bobot Badan (PBB), Dan Konversi Pakan Ayam Pedaging .....</b>	<b>435 – 439</b>
Stepanus R. Lodo, Dyah Lestari Yulianti, Waluyo Edi Susanto	
<b>Sapi Sonok Dalam Prospektif Ekonomi Kreatif .....</b>	<b>440 – 448</b>
Desi Kurniati Agustina	
<b>Keberpihakan (Political Will) Pemerintah Daerah Otonomi Dalam Pengembangan Sapi Madura .....</b>	<b>449 – 455</b>
A.Yudi Heryadi	
<b>Pengaruh Penggunaan Kombinasi Limbah Kulit Ubi Kayu Dan Ampas Tahu Terfermentasi Sebagai Pakan Alternatif Terhadap Konsumsi Ayam Pedaging .....</b>	<b>456 – 460</b>
Aju Tjatur Nugroho Krisnaningsih, Dyah Lestari Yulianti	



## **PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

Sulthon Miladiyanto  
Universitas Kanjuruhan Malang  
[sulthon\\_miladiyanto@yahoo.co.id](mailto:sulthon_miladiyanto@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan konflik atau masalah yang penyelesaiannya membutuhkan peran dari seorang Hakim dalam suatu pengadilan. Keputusan hakim dalam menyelesaikan konflik terkadang kurang memenuhi rasa keadilan, tetapi putusan itu harus dijalankan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini mengambil bahasan penegakan hukum dalam proses pengambilan putusan oleh hakim pengadilan di Indonesia pada saat ini dan yang akan datang. Dengan metode penelitian yuridis normatif. Hakim pengadilan yang putusannya sering dirasa kurang memenuhi rasa keadilan adalah hakim yang ketika memutus hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan saja tanpa melihat unsur kemanfaatan dan keadilan sosial. Diharapkan seorang hakim dalam memutus suatu perkara dapat memenuhi semua unsur yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan menempatkan konsep hukum untuk manusia, sehingga hakimlah yang menjadi titik sentral dalam penegakan hukum yang mampu menafsirkan peraturan dengan bijak, sehingga harus diciptakan hakim yang memiliki moralitas yang baik dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

**Kata kunci:** *Putusan Hakim, Perspektif Hukum Progresif*

### **Abstract**

Human beings in interacting with other people in the community can rise conflict or a problem where its resolution requires the role of a judge in a court. The judges decision to solve conflicts sometimes not meet the sense of justice, but decisions that have the power to be executed after a fixed law. In this research subjects of law enforcement in the process of taking decisions by the court judge in Indonesia at the moment and the future. This research use a method of juridical normative. Court judge that his ruling often it has not meet the sense of justice is only when judge based on legislation without see the element of significance and social justice. A judge give the decision is expected to meet a the elements of the law certainty, justice and significance. By placing the concept of law for human, judge who became a central point in law enforcement which able to meaning good rules, so it must be created judge good morality and high social awareness.

**Keywords:** *judge decision, Perspective of Progressive Law*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) diantara mereka. Konflik-konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai dengan pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. Konflik-konflik semacam memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Sebagaimana sebuah ungkapan "*ubi societas ibi ius*" atau dimana ada masyarakat, maka disitu perlu hukum. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia tidak akan terkontrol dan pastinya akan berlaku hukum rimba yaitu "siapa yang kuat dialah yang menang".

Indonesia sebagai negara hukum, sudah selayaknya menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, agar kepentingan dalam masyarakat terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Harapan dalam praktek hukum harus berlaku dengan baik (*Fiat Justitia et pereat mundus* yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Praktek penegakan hukum di Indonesia salah satunya dilaksanakan oleh lembaga Peradilan. Lembaga peradilan ini memainkan peranan yang penting karena ia satu-satunya institusi formal yang diberi mandat untuk mengelola segala permasalahan hukum (meliputi memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara) dari setiap warga negara yang mengalami kesulitan dalam mencari keadilan dengan prinsip keadilan yang bebas dan tidak memihak. Tolok ukur prinsip ini dapat di lihat sejauh mana kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terutama menegakkan peraturan perundangan dan keadilan maupun jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman (Secara yuridis ketentuan mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman telah diatur antara lain dalam Penjelasan Pasal 24 butir a, b, c dan Pasal 25 UUD 1945 serta dalam Pasal 1 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Putusan hakim terhadap terdakwa Adelin Lis yang menyatakan dibebaskan karena tidak terbukti melakukan pembalakan liar dan hanya melakukan kesalahan administrasi. Tetapi kenyataannya telah merugikan bangsa dan negara. Atau yang terbaru putusan Hakim Sarpi pada perkara praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh KPK yang berujung pengabulan praperadilannya. Ini dirasa mencederai semangat pemberantasan korupsi. Dan beberapa putusan lain yang di rasa jauh dari nilai keadilan dan kemanfaatan.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa penerapan hukum dalam proses pengambilan putusan sangat dipengaruhi oleh aktor utamanya, yaitu "Hakim". Hakim dalam pengambilan putusan dapat dikriteriakan menjadi dua yaitu pertama hakim memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa mendengarkan dinamika masyarakat, dan secara sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing (*isotorik*) dan yang kedua adalah hakim dalam memutus tidak hanya "mengejar peraturan" melainkan menarik keluar makna-makna yang terkandung didalamnya, yaitu hakim dalam memberikan putusan tidak hanya menggunakan akal pikirannya, melainkan juga seluruh kapasitas yang ada pada dirinya {tidak hanya rasio, silogisme, melainkan juga meliputi kepedulian (*compassion*), ikut merasakan (*empaty*), kejujuran (*sincerety*) dan keberanian (*dare*)} (Satjipto Rahardjo, *Konsep dan Karakteristik Hukum Progesif*, Makalah dalam Seminar Nasional hukum Progesif I, Semarang, 15 Desember 2007). Dinamika penegakan hukum inilah yang mewarnai proses pengambilan putusan oleh hakim pengadilan di Indonesia pada saat ini dan harapan yang akan datang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (Soerjono Soekanto, 2003, : 13). Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif (Soerjono Soekanto, 2003, : 30). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 2003, : 13). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan studi dokumentasi dimaksudkan sebagai penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang tidak dipublikasikan. Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum modern yang terbentuk dan berlaku dalam masyarakat bertujuan untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan agar kehidupan berjalan secara wajar dan bermartabat. Karena itu pada dasarnya, hukum itu menertibkan masyarakat, mewujudkan nilai-nilai

kemanusiaan yang fundamental, menyelesaikan sengketa secara tertib dan adil, memelihara dan mempertahankan ketertiban serta aturan-aturan dengan jika perlu menggunakan kekerasan secara terorganisasi (menerapkan sanksi hukum) melalui prosedur pelaksanaan tertentu yang harus dijalankan secara ketat. Dapat dikatakan secara umum, hukum bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan serta fungsi-fungsi tersebut, maka hukum menampilkan diri atau ditampilkan dalam berbagai kaidah hukum dan putusan-putusan hakim. Hukum mewujudkan diri ke dalam "teks" yang dapat berupa aturan-aturan hukum yang berbentuk tertulis (perundang-undangan).

Praktek hukum di Indonesia terutama sejak jaman orde baru memperlihatkan situasi yang sangat dipengaruhi oleh positivisme hukum, bahkan positivisme undang-undang (*legisme*), sehingga hal ini menyebabkan kebanyakan para praktisi hukumnya cenderung berpikir positivistik dan legistik dalam menjalankan profesinya masing-masing. Dalam pandangan tentang hukum yang positivistik yang demikian, maka hukum adalah apa yang secara eksplisit tercantum dalam aturan hukum yang sah (perundang-undangan). Dibawah pengaruh ajaran positivisme hukum yang kuat, maka dalam praktek hukum di Indonesia penggunaan atau perujukan pada asas-asas hukum dalam mengargumentasi suatu pendirian atau pendapat hukum atau dalam menetapkan putusan hukum kurang mendapat perhatian.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja yang mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan *social justice*. Akan tetapi dalam praktiknya sekarang ini, Indonesia yang secara gentar mengklaim dirinya sebagai negara hukum belum bisa memberikan keadilan secara merata. Banyak para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan tidak bersifat profesional.

Dalam penerapan hukum oleh hakim di Indonesia saat ini, seringkali para penegak hukum (hakim) menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur/aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal (hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan). Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup, tugas, dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan (UU No. 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman), selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. Secara normatif, tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan telah diatur dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman.

Menurut Gustav Radbruch bahwa hukum bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*). Kendatipun ketiganya selalu mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis, namun ketiganya lebih sering berada dalam suasana hubungan yang tegang satu sama lain (Satjipto Rahardjo, 2007 : 80-81).

Memang dalam kenyataannya sekarang ini, proses penerapan hukum dalam bentuk putusan-putusan di pengadilan yang di keluarkan oleh hakim hanya berdasarkan undang-undang saja, dengan kata lain hakim memutus perkara dengan pertimbangan "mengeja peraturan" yang sudah ada dan dianggap memenuhi rumusan perkara yang hendak diputus tersebut tanpa menanyakan pada hati nurani hakim itu sendiri, apakah putusannya itu memenuhi ketiga nilai dasar (kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan) atau hanya sebatas apa yang sesuai dengan peraturan saja. Sehingga dalam hal ini hakim berperan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) tidak lebih, tidak kurang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa peran hakim yang demikian ini, maka pengadilan sebagai wadah hakim memberikan putusannya menjadi institusi hukum yang sempit dan terisolasi. Isolasi tersebut juga mengundang asosiasi ke arah kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*), oleh karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut. Itulah sebabnya secara

sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan dinamika masyarakatnya dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat tersebut (*isoterik*)

Proses penerapan hukum oleh hakim yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan melalui putusannya tidaklah cukup manakala hanya didasarkan pada prosedur, aturan main secara formal (berdasarkan peraturan perundang-undangan). Selain itu juga, peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh persoalan hukum yang terus berkembang di dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini disadari, akan adanya kemungkinan bergesernya proses penegakan hukum ke jalur lambat. Untuk mengatasi hal tersebut, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*) Yang dimaksud dengan *Recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Dan hasil penemuan hukum menjadi dasar baginya untuk mengambil keputusan (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 47)

Pada dasarnya penemuan hukum tetap harus mendasarkan pada sistem hukum yang ada. Adapun sistem hukum yang secara umum dijadikan dasar dalam proses penemuan hukum antara lain sistem hukum *civil law* dan *common law*, *Civil law sistem* adalah Suatu sistem hukum sipil yang berdasarkan pada kode sipil yang sudah terkodifikasi, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk undang-undang, yang disusun secara sistematis dan lengkap dalam bentuk kodifikasi atau kompilasi. Negara penganut sistem ini adalah Negara-negara Eropa Kontinental, termasuk negara bekas jajahannya seperti Indonesia. Sedangkan *Common law sistem* adalah suatu sistem hukum yang berdasarkan suatu custom atau kebiasaan berdasarkan preseden atau judge made law. Dalam sistem ini, hakim di pengadilan dapat menggunakan prinsip membuat hukum sendiri (*judge made law*) dengan melihat kasus-kasus yang sebelumnya pernah terjadi. Undang-undang hanya mengatur pokok-pokoknya saja, yang diutamakan adalah kebiasaan dan hukum adat masyarakat setempat. Sistem hukum common law ini di praktekkan dinegara-negara anglo saxon, seperti Inggris dan Amerika (Muchsin, 2004 : 7). Seperti Penafsiran menurut sejarah hukum (*Rechts historische interpretatie*), sosiologis, ekstensif, analogi dan lain-lain.

Dalam proses perjalanan potret hukum di Indonesia, yang didasarkan pada *civil law system* dan *common law system* ternyata belum bisa efektif menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Atas dasar inilah, muncul berbagai gagasan alternatif yang berusaha memberikan sistem hukum yang ideal dalam penerapan hukum oleh pengadilan di Indonesia. Salah satu gagasan yang berusaha merubah sistem hukum di Indonesia yang sesuai dengan kosmologi bangsa Indonesia adalah melalui konsep hukum progresif yang dilontarkan oleh pakar sosiologi hukum dari Undip yaitu Prof. Satjipto Rahardjo, SH atau sering di panggil Prof. Tjip.

Dalam konsep hukum progresif, ia akan membangun suatu cara ber hukum yang memiliki karakteristik sendiri, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut (Satjipto Rahardjo, Hal 139-144):

1. Paradigma hukum progresif adalah bahwa "hukum adalah untuk manusia".
2. Hukum progresif menolak bahwa hukum adalah tolok ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum.
3. Harus memberikan lorong-lorong untuk melakukan pembebasan dari hukum formal.
4. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan diametral paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaik-baiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

Dapat dikatakan bahwa Konsep hukum progresif memandang dan memahami hukum itu sebagai suatu institut yang mengalir. Ia menjadi demikian, oleh karena ordinat hukum itu bukan hanya peraturan, melainkan juga manusia dan masyarakat. Untuk mewartakan dinamika tersebut, hukum progresif memilih paradigma yang berbunyi "Hukum adalah untuk manusia". Dengan

menggunakan konsep bahwa ordinat untuk mempelajari hukum terdiri dari peraturan, manusia dan masyarakat, maka penerapan hukum dalam proses pengambilan putusan di Pengadilan pun tidak terlepas dari ketiga ordinat tersebut agar dalam memberikan putusan selain kepastian hukum, hakim bisa memberikan rasa keadilan, serta kemanfaatan. Sehingga, hukum yang hadir dimasyarakat mampu memberikan kebahagiaan.

Untuk mencapai penerapan hukum yang ideal dan dikehendaki masyarakat dalam bentuk putusan di pengadilan, hakim harus memperhatikan ketiga ordinat diatas. Adapun mengenai ordinat tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut;

A. Peraturan;

Peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat penting (dominasi) dalam pelaksanaan penerapan hukum dalam bentuk putusan di pengadilan. (Sebagai asas legalitas)

B. Manusia (*behaviour*)

Peranan manusia pengambil putusan menjadi sangat penting, hukum ini menghendaki agar hakim tidak hanya menggunakan akal pikirannya, melainkan juga seluruh kapasitas yang ada dalam dirinya. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa "untuk berpikir tentang para hakim tidak hanya dipahami secara yuridis, tetapi terutama secara sosiologis".

C. Masyarakat

Sejak hukum memiliki masyarakat sebagai bagian dari ordinat dalam penerapan hukum, maka hukum tidak dapat dilepaskan dari sejarah. Hukum bukan institut yang a-historis, melainkan historis (*historisch bepaald*). Berdasarkan pemikiran yang demikian itu, maka perkembangan dan perubahan hukum itu tidak dapat menyembunyikan dinamika sosial dibelakangnya.

Dekonstruksi pemahaman bahwa hukum itu bukan merupakan peraturan semata, melainkan dan terutama adalah perilaku manusianya serta masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam menerapkan hukum dalam bentuk putusan di pengadilan tidak boleh melepaskan pandangannya terhadap ketiga unsur tersebut. Dalam memberikan putusan, hakim wajib menerapkan peraturan (undang-undang). Namun peraturan ini tidak sekedar diterapkan begitu saja menggunakan "logika peraturan" (yaitu karena sudah merasa sesuai dengan kalimat undang-undang, putusan yang kemudian dijatuhkan dianggap benar), tapi harus menggunakan "logika kepatutan sosial (*social reasonableness*)" dan juga logika keadilan. Disamping peraturan, unsur manusia (hakim) juga menjalankan peran yang sangat penting, hal ini dapat dikatakan seperti ini karena manusia bisa menjalankan hukum untuk jujur mencapai keadilan, tetapi juga bisa membelokkan keadilan demi kepentingan lain. Dan unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah masyarakat. Hakim pada saat mempertimbangkan suatu perkara yang akan diputuskan harus sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Sehingga, dengan terpenuhinya ketiga unsur diatas, maka penerapan hukum yang ideal dalam bentuk putusan pengadilan dapat tercapai.

## **KESIMPULAN**

Penerapan hukum yang sedang diberlakukan dalam proses pengambilan putusan oleh pengadilan di Indonesia adalah dalam bentuk putusan hakim yang hanya berdasarkan undang-undang saja tanpa menanyakan pada hati nurani hakim itu sendiri, apakah putusannya itu memenuhi nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga dalam hal ini hakim berperan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*).

Penerapan hukum di Indonesia yang didasarkan pada sistem hukum *civil law* (hakim memutus hanya berdasarkan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan) belum bisa efektif menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Konsep hukum progresif dapat dijadikan solusi dimana memandang dan memahami hukum itu sebagai suatu institut yang mengalir, karena ordinat hukum itu bukan hanya peraturan, melainkan juga manusia dan masyarakat. Dalam memberikan putusan, hakim wajib menerapkan peraturan namun peraturan ini tidak sekedar diterapkan begitu saja menggunakan "logika peraturan" (yaitu karena sudah



merasa sesuai dengan kalimat undang-undang, putusan yang kemudian dijatuhkan dianggap benar), tapi harus menggunakan "logika kepatutan sosial (*social reasonableness*)" dan juga logika keadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum*, Penerbit STIH IBLAM, Jakarta, 2004

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007

-----, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007

Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Satjipto Rahardjo, Makalah: *Konsep dan Karakteristik Hukum Progesif*, Makalah dalam Seminar Nasional hukum Progesif I, Semarang, 15 Desember 2007

UUD RI 1945

UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman



## Universitas Kanjuruhan Malang

Jl. S. Supriadi 48 Malang (65148) Telp. (0341) 801488 Fax. (0341) 831432

Website : <http://www.unikama.ac.id> <http://lppm.unikama.ac.id>

Email : [lppm@unikama.ac.id](mailto:lppm@unikama.ac.id)



9 772088 617005

*Brilliant Bright Future*